

ISU Sepekan

BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL

Minggu ke-1 Bulan Maret 2021

(tanggal 26 Februari s.d. 4 Maret)



PEMULIHAN DEMOKRASI DI MYANMAR

Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Rizki Roza

Peneliti Bidang Hubungan Internasional

rizki.roza@dpr.go.id



ISU ATAU PERMASALAHAN

Militer telah menguasai pemerintahan Myanmar melalui aksi kudeta pada 1 Februari lalu. Pasca kudeta, kondisi Myanmar cukup mengkhawatirkan. Militer menggunakan kekerasan untuk menghalau aksi protes damai rakyat Myanmar yang menolak kudeta. Militer juga menerapkan berbagai aturan yang menghambat hak-hak sipil dan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. ASEAN dianggap belum memberi respons yang memadai terhadap perkembangan di Myanmar. Bahkan beberapa negara anggota ASEAN menganggap kudeta yang terjadi sebagai urusan dalam negeri Myanmar.

Indonesia merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang cukup serius mendorong ASEAN untuk mencapai kesatuan sikap atas persoalan ini. Menlu Retno telah memulai langkah ke arah itu dengan mengunjungi Brunei pada 16 Februari yang dilanjutkan ke negara ASEAN lainnya, serta beberapa negara Barat guna menggali dukungan.

ASEAN untuk pertama kalinya berkumpul sejak kudeta terjadi, secara virtual, membicarakan persoalan Myanmar dan isu kawasan lainnya dengan menggelar Pertemuan Informal Tingkat Menteri Luar Negeri pada 2 Maret. Melalui pertemuan itu, Menlu RI Retno LP Marsudi menegaskan pentingnya setiap negara anggota ASEAN mengimplementasikan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam ASEAN secara utuh. Retno menegaskan pentingnya prinsip non-intervensi bagi ASEAN, dan juga mengingatkan tidak kalah pentingnya untuk menghormati dan menjalankan prinsip dan nilai lain dalam Piagam ASEAN, termasuk demokrasi, penghormatan HAM, tata kelola pemerintahan yang baik, supremasi hukum, dan pemerintahan yang konstitusional. Indonesia mendesak militer Myanmar untuk menahan diri serta tidak menggunakan kekuatan dan kekerasan.



FUNGSI DPR

Diplomasi:

DPR, terutama melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) mempunyai mandat untuk menjalankan fungsi diplomasi. Fungsi diplomasi dijalankan tidak hanya untuk mendukung upaya pemerintah RI memperjuangkan kepentingan nasional di fora internasional, tetapi juga ikut berkontribusi bagi penyelesaian permasalahan-permasalahan di kawasan. Kudeta yang terjadi di Myanmar merupakan salah satu permasalahan di kawasan yang saat ini perlu menjadi perhatian DPR dan membutuhkan kontribusi fungsi diplomasi DPR untuk mencari solusi yang baik bagi Myanmar dan juga baik bagi stabilitas kawasan Asia Tenggara secara lebih luas.

■ ATENSI DPR RI

- Sejak Myanmar bergabung dalam keanggotaan ASEAN pada 1997, ASEAN terus berupaya untuk merangkul junta militer Myanmar agar mau lebih terbuka pada aspirasi rakyatnya. Komitmen ASEAN ini jelas memiliki arti penting bagi setiap kemajuan transisi demokrasi Myanmar. Dan saat demokrasi Myanmar tengah mengalami kemunduran saat ini, upaya merangkul junta tetap harus dijaga. Opsi-opsi penyelesaian masalah hanya akan tetap terbuka jika militer Myanmar juga masih mau membuka diri dan berkomunikasi dengan ASEAN. Di sini, DPR melalui fungsi diplomasinya dapat berperan membantu pemerintah menjaga komunikasi dengan para penguasa militer Myanmar. *Second track diplomacy* DPR yang tentunya lebih luwes dibanding diplomasi oleh pemerintah akan memiliki nilai strategis dalam upaya ASEAN mengembalikan transisi demokrasi Myanmar pada jalurnya.
- DPR tidak hanya dapat berkontribusi dalam menjaga komunikasi dengan junta, tetapi juga dibutuhkan untuk mengingatkan junta mengenai penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan penghentian penggunaan kekerasan terhadap sipil yang melakukan aksi damai.
- Peran DPR tidak boleh berhenti pada upaya merangkul junta dan mendorong keterbukaan junta terhadap dukungan pihak asing, melainkan yang tidak kalah pentingnya DPR juga perlu membantu upaya pemerintah RI untuk menggalang dukungan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Ini penting mengingat sesama anggota ASEAN masih sering terjadi perbedaan pandangan dan kesulitan mencapai kesamaan sikap, termasuk dalam isu-isu terkait Myanmar. Hal ini merupakan ujian bagi sentralitas ASEAN. ASEAN harus mempunyai kesamaan sikap dan komitmen bagi penyelesaian persoalan di Myanmar. ASEAN harus mampu membuktikan pada masyarakat internasional bahwa sebagai organisasi kawasan, ASEAN bisa bersama-sama mengelola dan menyelesaikan masalah di intra kawasan Asia Tenggara. DPR melalui fungsi diplomasi parlemen dapat berperan dalam setiap upaya ini.

■ SUMBER

- “ASEAN Desak Myanmar Kembalikan Demokrasi, Kompas, 3 Maret 2021, hal. 1.
- “ASEAN Siap Fasilitas Dialog Rakyat Myanmar”, 3 Maret 2021, hal. 2.
- “RI: Myanmar Sangat Mengkhawatirkan”. Republik, 3 Maret 2021, hal. 4.
- “Krisis Myanmar: ASEAN Menjadi Tumpuan Harapan”, Kompas, 4 Maret 2021, hal. 4.
- “Unjuk Rasa di Myanmar Tidak Mereda”, Media Indonesia, 4 Maret 2021, hal. 2.